

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN PULAU LAUT UTARA

Iberahim

Program Studi Megister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti upaya Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam pengentasan kemiskinan masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. *Key informan* pada penelitian ini adalah Camat Pulau Laut Utara, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru serta Tokoh Masyarakat Nelayan Kecamatan Pulau Laut Utara. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan reduksi data, display data, dan konklusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan pada masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara antara lain pembangunan infrastruktur perhubungan untuk memperlancar akses transportasi guna menunjang kegiatan perekonomian masyarakat, bantuan sosial dengan berupa bantuan kepada kelompok nelayan dan perorangan yang telah dianggarkan melalui APBD di Kabupaten Kotabaru. (2) Faktor-faktor yang menghambat upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan pada masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara antara lain faktor alam, faktor kultural / budaya, dan faktor pendidikan.

Kata Kunci : Pengentasan, Kemiskinan, Nelayan

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau besar dan kecil serta 81.000 km garis pantai. Pulau tersebut membentang dari Sabang hingga Merauke mengandung ribuan sungai, danau, rawa, dan genangan air lainnya dengan potensi perikanan air tawar yang sangat besar. Garis pantai tersebut terpanjang kedua didunia yang berpotensi sangat besar bagi pengembangan perikanan air payau dan air laut. Daratan Indonesia menutupi sepertiga luas nusantara dan dua pertiga sisanya berupa lautan atau seluas 5,8 juta km².

Upaya untuk mengelola sumber daya alam berupa laut tersebut dikeluarkanlah undang-undang. Dalam mengimplementasikan undang-undang ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru secara nyata mendukung pemberdayaan masyarakat nelayan tradisional dengan peningkatan kesejahteraan nelayan, melalui: (1) peningkatan kemampuan nelayan serta

penguatan lembaga pendukungnya, (2) pengamanan ketahanan pangan, (3) peningkatan akses nelayan kepada sumber daya produktif seperti teknologi, informasi pemasaran, pengolahan dan permodalan, (4) perbaikan iklim usaha dalam meningkatkan diversifikasi usaha dan memperluas kesempatan berusaha, (5) peningkatan kemampuan manajemen dan kompetensi kewirausahaan di kalangan pelaku usaha bidang perikanan, (6) mendorong peningkatan standar mutu komoditas, penataan dan pengembangan industri pengolahan produk perikanan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah, (7) peningkatan efisiensi sistem distribusi, koleksi dan jaringan pemasaran produk untuk perluasan pemasaran, dan (8) peningkatan pemanfaatan sumber daya perikanan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kabupaten Kotabaru dalam potensi perikanan pada tahun 2011, dimana

masyarakat nelayan pada umumnya memakai alat tangkap tradisional. Misalnya alat tangkap pancing masih sekitar 47,64% dari jumlah alat yang digunakan, kemudian bubu sekitar 17,99% dan jaring insang tetap 10,23%, sedangkan peralatan lainnya dibawah 10%. Produksi perikanan selama tahun 2011 sebesar 20.994. ton dengan nilai 165.292.05 juta rupiah. Terdiri atas hasil budi daya 1.474,2 ton dengan nilai 31.707.05 juta rupiah serta hasil penangkapan dilaut dan perairan umum sebanyak 19.519,8 ton dengan nilai 133.585 juta rupiah.

Namun demikian kemiskinan masih tidak bisa lepas dari masyarakat di Indonesia. Kemiskinan adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain; tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan.

Termasuk pada masyarakat nelayan di Kabupaten Kotabaru. Keadaan masyarakat nelayan Kabupaten Kotabaru, terutama di Kecamatan Pulau Laut Utara sangat memprihatinkan karena masih sebagian besar berada dibawah garis kemiskinan. Penyebab dari kemiskinan masyarakat setempat adalah masyarakat nelayan masih menggunakan alat tradisional dalam menangkap ikan, tempat memasarkan hasil tangkapan sangat jauh sehingga memerlukan *living cost* (biaya hidup) yang cukup besar sebaliknya harga ikan relatif murah.

Melihat kondisi masyarakat nelayan yang masih terbelakang dengan kemiskinannya, di lain pihak potensi laut justru menjanjikan, ditopang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan laut guna peningkatan kesejahteraan mendasar pemikiran diatas maka penulis termotivasi untuk meneliti tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam pengentasan kemiskinan masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara.

2. Rumusan Masalah

Dari permasalahan dan fokus penelitian, dapat disusun suatu rumusan permasalahan pada penelitian ini, yakni sebagai berikut: Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam

pengentasan kemiskinan masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara? Faktor-faktor apa saja yang menghambat upaya Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam pengentasan kemiskinan masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara?

3. Tinjauan Pustaka Pengertian Kemiskinan

Ambar (2004), berpendapat bahwa pengertian kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, pasilitas hidup lainnya. Sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi sangat terbatas.

Sunyoto (2004) menyimpulkan paling tidak ada tiga konsep kemiskinan yaitu : kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan subyektif. Konsep kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkret. Ukuran itu lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat (sandang, pangan dan papan). Konsep kemiskinan relatif dirumuskan dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasarnya adalah kemiskinan disuatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, dan kemiskinan dengan waktu tertentu berbeda dengan waktu yang lain. Sedangkan konsep kemiskinan subyektif dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri.

4. Metode Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud memperoleh deskripsi yang mendalam tentang upaya Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam pengentasan kemiskinan masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian *deskriptif kualitatif* merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan kesesuaian substansi permasalahan pada penelitian ini dan juga pertimbangan entry data baik orang, program, struktur, maupun interaksi sesuai dengan kebutuhan deskripsi yang mendalam.

Untuk memperoleh data dan informasi yang sangat diperlukan bagi penelitian kualitatif ini, maka di perlukan adanya informan penelitian. Adapun informan penelitian ini adalah orang-orang yang terkait dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Utara dan juga pemerhati masalah kemiskinan masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, yaitu : Camat Pulau Laut Utara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru, Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotabaru, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru, serta Tokoh Masyarakat Nelayan Kecamatan Pulau Laut Utara.

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Bagian ini menjelaskan bagaimana peneliti berperan sebagai instrumen penelitian, selain itu perlu juga dijelaskan alat bantu apa yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini alat bantu pengumpulan data adalah fotografi, dokumen, dan perekam suara.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, makalah, peraturan-peraturan, jurnal penelitian dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang dirancang khusus untuk penelitian, sehingga dapat dicapai tujuan penelitian. Dokumentasi, perekaman bentuk suatu informasi baik itu dokumen ataupun catatan-catatan terkait dengan permasalahan penelitian.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dengan melalui tiga tahapan yaitu : Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dalam catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengodean, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo. Penyajian data, yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk yang sistematis sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif, serta dapat dipahami maknanya. Penyajian data dimaksudkan untuk menentukan pola-pola bermakna, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data direduksi peneliti melakukan penyajian data sehingga data-data mengenai penelitian ini, dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami. Menarik kesimpulan, yaitu analisa dilakukan secara terus-menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data guna menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan suatu pola tentang peristiwa yang terjadi. Peneliti dapat membuat kesimpulan yang longgar dan terbuka yang pada awalnya belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan akhir dirumuskan setelah pengumpulan data terakhir, tergantung pada catatan-catatan lapangan, pengodean, penyimpanan data dan

metode pencarian ulang yang digunakan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan matriks-matriks yang dibuat untuk menemukan pola yang sesuai dengan penelitian.

5. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru mempunyai luas 159,30 km² yang terbentang di 116,11° – 116,28° BT dan 3,21° – 3,37° LS. Ibukota Kecamatan Pulau Laut Utara adalah Dirgahayu. Kecamatan Pulau Laut Utara memiliki batas-batas wilayah : Utara : Selat Laut; Selatan : Kecamatan Pulau Laut Timur; Timur : Kecamatan Pulau Laut Tengah; Barat : Selat Laut.

Jumlah penduduk di Kecamatan Pulau Laut Utara adalah yang terbesar di Kabupaten Kotabaru yakni berjumlah 79.020 jiwa yang terdiri dari 40.364 laki-laki dan 38.656 perempuan, serta keseluruhan berjumlah 20.172 kepala keluarga (berdasarkan sensus penduduk tahun 2010).

Kecamatan Pulau Laut Utara merupakan kecamatan dengan kemiskinan tertinggi di Kabupaten Kotabaru dengan 1.744 rumah tangga miskin atau 8.730 jiwa yang berada di bawah garis kemiskinan. Pekerjaan yang dominan yang dilakukan oleh warga adalah sebagai nelayan.

Keadaan masyarakat nelayan Kabupaten Kotabaru, terutama di Kecamatan Pulau Laut Utara sangat memprihatinkan karena masih sebagian besar berada dibawah garis kemiskinan. Penyebab dari kemiskinan masyarakat setempat adalah masyarakat nelayan masih menggunakan alat tradisional dalam menangkap ikan, tempat memasarkan hasil tangkapan sangat jauh sehingga memerlukan *living cost* (biaya hidup) yang cukup besar sebaliknya harga ikan relatif murah. Penggunaan berbagai cara penangkapan ikan ilegal yang menyebabkan ekosistem laut rusak sehingga hasil tangkapan nelayan berkurang, penggunaan alat tangkap yang masih tradisional sehingga hasil tangkapan yang diperoleh sangat sedikit, kemudian adanya monopoli dalam penangkapan ikan oleh nelayan yang bermodal besar dengan kapasitas kapal dan pukat yang daya tangkapnya lebih besar sehingga mematikan nelayan kecil.

Pada awalnya seluruh nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara masih menggunakan perahu dayung sampan dan menjual hasil tangkapnya masing-masing ke Kotabaru. Mereka menjual hasil tangkapan ketika sudah terkumpul banyak dengan cara kolektif pada nelayan yang hendak ke Kotabaru menjual hasil tangkapan karena pada saat itu belum ada agen tempat menjual hasil tangkap di desa. Perjalanan yang ditempuh menuju Kotabaru memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan nelayan memilih bermalam di Kotabaru karena kelelahan mendayung. Mereka menjual hasil tangkapan pada pembeli dari Jepang untuk keperluan karyawan / di ekspor ke negaranya. Hasil tangkapan yang dijual pada pembeli adalah hasil tangkapan dengan kualitas yang bagus, sehingga pembeli tersebut memberi kepercayaan pada nelayan untuk membeli hasil tangkapannya.

Kondisi kemiskinan nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara dalam penelitian ini dikarenakan :

- Masih menggunakan perahu dayung sampan untuk melakukan aktifitas penangkapan di laut.
- Memiliki banyak tanggungan keluarga namun sumber pendapatan keluarga hanya mengandalkan kepala keluarga.
- Dilihat dari kondisi rumah, maka rumah nelayan yang dikategorikan miskin yaitu rumah yang masih beratapkan daun nipah dengan dinding semi permanen dari kayu dan biasanya sudah tua karena rumah warisan dari orang tua.
- Dilihat dari kapal yang dimiliki, maka nelayan yang dikategorikan miskin secara lokal yaitu nelayan yang mesin kapalnya sudah tua dan bentuk kapalnya tidak bersih akibat jarang dirawat seperti di cat karena perawatan kapal membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu untuk tidak menurunkan kapal tersebut ke laut, sehingga nelayan yang miskin jarang merawat kapalnya karena harus mencari nafkah di laut.
- Dilihat dari kepemilikan harta benda, maka nelayan yang dikatakan miskin secara lokal yaitu nelayan yang tidak memiliki alat elektronik maupun kendaraan bermotor.

Karena itu melalui SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru, diambil langkah-langkah strategis untuk mengetaskan kemiskinan di Pulau Laut Utara melalui Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dirumuskan misi:

- a. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan.
- b. Mengembangkan usaha perikanan budidaya secara berkelanjutan dan ramah lingkungan berbasis IPTEK.
- c. Meningkatkan ketersediaan bahan pangan, bahan baku industri pengolahan ikan, PAD dan devisa negara.
- d. Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
- e. Menciptakan iklim usaha kelautan dan perikanan yang kondusif.
- f. Memulihkan perlindungan sumberdaya dan lingkungannya.

Program-Program Pengembangan Perikanan Tangkap oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional PPI
- c. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan/PPI
- b. Pengadaan/ Rehabilitasi Sarana Produksi Perikanan Tangkap
- c. Pembuatan Peta Daerah Penangkapan
- d. Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap
- e. Penyediaan armada perikanan untuk usaha perikanan rakyat
- f. Pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan perikanan
- g. Pengadaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan
- h. Pembinaan dan pelatihan nelayan aparaturnya
- i. Pengkayaan *Stock* Ikan
- j. Peningkatan Sarana Mobilitas Pelabuhan
- k. Bimbingan Teknis Aplikasi Perikanan Tangkap
- l. Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengawasan Sumberdaya Kelautan

- m. Identifikasi dan Penangkaran Ikan
- n. Pengawasan dan Penertiban *Illegal Fishing*
- o. Pengembangan karantina dan pengelolaan karantina ikan
- p. Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
- q. Peningkatan Keselamatan, mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
- r. Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan SDI

Faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara, yakni :

- a. Sikap mental masyarakat yang masih tradisional yang dikarenakan pendidikan yang masih kurang dan juga sikap mental yang sudah membudaya. Seakan nelayan merasa tidak punya pilihan lain sebagai mata pencahariannya. Dengan demikian apa yang terjadi, nelayan tetap bekerja sebagai nelayan karena hanya itu yang bisa dikerjakan.
- b. Kurangnya permodalan dalam menjalankan usaha.
- c. Kurangnya sosialisasi untuk pengembangan ekonomi masyarakat yang harusnya dijalankan dengan pendampingan khusus.

Penanggulangan masalah kemiskinan pada masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara dilakukan dengan membuka seluas-luasnya potensi peningkatan ekonomi masyarakat nelayan yang kebanyakan adalah nelayan tangkap. Secara khusus permasalahan pengembangan dan pembangunannya adalah sebagai berikut.

- a. Masalah internal perikanan tangkap, diantaranya :
 - Sebagian besar masih merupakan nelayan tradisional dan struktur armada perikanan didominasi skala kecil (≤ 30 GT)
 - Ketimpangan pemanfaatan stok ikan antar wilayah maupun antar spesies.
 - Terjadinya penangkapan ikan secara *illegal fishing*
- b. Masalah eksternal, diantaranya :

- Rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti penting dan nilai strategis sumberdaya kelautan dan perikanan bagi pembangunan ekonomi daerah, sehingga perhatian, pengetahuan (wawasan) dan penguasaan serta penerapan IPTEK kelautan dan perikanan juga menjadi rendah.
- Belum adanya dukungan permodalan yang memadai
- Kebijakan moneter, fiskal dan investasi belum kondusif
- c. Permasalahan Pengembangan Produksi Penangkapan Ikan dilaut, diantaranya :
 - Pemanfaatan perairan lepas pantai masih belum optimal karena sarana dan prasarana belum memadai
 - Data potensi perikanan sudah kadaluarsa
 - Penanganan/sertifikasi hasil perikanan belum ada
 - Potensi Perikanan laut belum dimanfaatkan secara optimal
- d. Permasalahan Penangkapan Ikan diperairan Umum, diantaranya :
 - Potensi Perairan Umum didaerah ini tersebar sehingga perlu adanya survey potensi perikanan perairan umum
 - Masih terjadi penangkapan ikan dengan alat/bahan terlarang.
 - Pada bulan pertama awal musim hujan terjadi penangkapan ikan secara besar-besaran untuk dikonsumsi, serta penangkapan induk ikan yang akan memijah.
 - Lemahnya tingkat ketrampilan dan permodalan.
- e. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pengembangan perikanan yang berwawasan lingkungan mutlak harus dilaksanakan. Gangguan terhadap kelestarian sumberdaya hayati perikanan dan lingkungan hidup akan mempengaruhi usaha peningkatan produksi.
- f. Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pembinaan pasca panen dan pemasaran antara lain, diantaranya :

 - Pola produksi nelayan/petani ikan belum berorientasi pada pasar, hal ini disebabkan karena informasi pasar yang masih kurang.
 - KUD belum mampu mengelola pelelangan ikan/pemasaran hasil para petani/nelayan kecil.
- g. Kelembagaan

Keberhasilan pembangunan salah satunya ditentukan oleh kemampuan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain, diantaranya :

 - Aparatur pelayanan/penyuluhan baik secara kualitas dan kuantitas masih kurang.
 - Penyempurnaan tata hubungan kerja baik secara vertikal maupun horisontal.
 - Pola pengembangan usaha perikanan masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan.

6. Kesimpulan

Upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan pada masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara antara lain : Pembangunan infrastruktur perhubungan untuk memperlancar akses transportasi guna menunjang kegiatan perekonomian masyarakat. Bantuan sosial dengan berupa bantuan kepada kelompok nelayan dan perorangan yang telah dianggarkan melalui APBD di Kabupaten Kotabaru yang salah satunya adalah dengan pembuatan kartu nelayan sebagai bentuk pendataan untuk pembinaan nelayan serta

pemberian bantuan berupa alat GPS kepada salah satu kelompok nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara.

Faktor-faktor yang menghambat upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan pada masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara antara lain : Faktor alam, secara geografis letak Kecamatan Pulau Laut Utara tersebut langsung berdekatan dengan laut bahkan dikelilingi oleh laut, sehingga mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan yang memanfaatkan dan sekaligus bergantung dari sumberdaya laut dan perikanan. Faktor kultural / budaya, nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara sebagian melaut dengan peralatan seadanya karena kebiasaan menggunakan alat tradisional, selain itu juga faktor malas dan pasrah juga boros pada nelayan merupakan salah satu penyebab mereka berada dalam kondisi miskin, serta pengaturan keuangan rumah tangga yang tidak baik. Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan / *skill* yang dimiliki (kualitas SDM) masyarakat Kecamatan Pulau Laut Utara yang mayoritas adalah nelayan yang menggantungkan hidup dari sumberdaya laut dan perikanan.

Untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat nelayan miskin yang ada di Kecamatan Pulau Laut Utara disarankan untuk dapat : Dilaksanakannya program bantuan sarana prasarana penangkapan ikan (speed boat, mesin tempel, jaring, alat pancing, *cool box*, *fish fender*, GPS). Pelatihan budidaya ikan, dan rumput laut. Pendampingan usaha perikanan. Magang nelayan dan pembudidaya ikan. Dilakukan sosialisasi dan pembinaan mental wirausaha kepada masyarakat nelayan.

Daftar Pustaka

Bogdan, Robert dan Taylor, Steven J., 1993, *Kualitatif : Dasar-Dasar Penelitian*, (terjemahan) Usaha Nasional, Surabaya Indonesia.

Dunn, William N., 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (terjemahan), Edisi

Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2001, *Reinventing Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Islamy, M. Irfan. 1994. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O., 1991, *Pengantar Kebijakan Publik* (terjemahan), C.V. Rajawali, Jakarta.
- Lindblom, Charles E., 1980, *Proses Penetapan Kebijakan* (terjemahan), Erlangga, Jakarta.
- Miles, Matthew B. & A. Michel Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI-Press, Jakarta.
- Moleong, Lexi J., 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Parsons, Wayne, 2005, *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan* (terjemahan), Kencana, Jakarta
- Sadu Wasistiono, et all, 2002. *Evaluasi Pelaksanaan Otonomi daerah Sebagai Upaya Awal Merevisi UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999*. Prosiding Seminar Nasional. Diterbitkan oleh Pusat Kajian Pemerintahan STPDN.
- Sadu Wasistiono. 2006. *Pasang Surut Otonomi Daerah- Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Yayasan Tifa. Jakarta.
- Sadu Wasistiono dan Fernandes Simangunsong. 2009, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Syaukani H.R. 2004. *Menolak Kembalinya Sentralisasi – Memantapkan Otonomi Daerah*, editor Hery Susanto dkk, Penerbit Komunal, Jakarta. 2004.

- Santoso, Purwo dkk (eds.). 2004. *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Sharkansky, Ira, 1970. *Public Administration, Policy Making in Government Agencies*, Chicago, Rand McNally College Publishing Coy.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.